

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teori untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya. Adapun teori meso dari penelitian ini adalah Teori Pertahanan Negara dan Teori Keamanan Maritim. Lebih jauh, teori mikro dari penelitian ini adalah Teori Kawasan, Teori Hubungan Internasional, Teori Diplomasi, Teori Kebijakan Publik, dan Teori Perbandingan Kebijakan Luar Negeri.

2.1.1. Teori Pertahanan Negara

Kebijakan pertahanan negara perlu dilaksanakan karena berkaitan dengan kontinuitas dan survivalitas sebuah negara. Pertahanan negara didefinisikan oleh Victoria (2018) sebagai himpunan kebijakan dan strategi, terutama didasarkan pada penggunaan militer dan sarana diplomatik sebagai kekuatan nasional, yang ditujukan untuk menetralsisir ancaman atau serangan internal atau eksternal apapun terhadap keamanan nasional juga berkontribusi pada pembangunan nasional. Pertahanan di sini berarti adalah instrumen untuk mencapai tatanan keamanan yang sesungguhnya di mana ancaman telah dinetralkan.

Lebih lanjut, untuk mengetahui pertahanan negara, maka hal yang perlu dianalisis pertama kali adalah kepentingan nasional (Hamilton, 1985). Hal ini dikarenakan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pertahanan negara berfungsi melindungi negara dari ancaman internal maupun eksternal yang mengganggu survivalitas negara ataupun perkembangannya. Maka dari itu, kebijakan pertahanan negara harus dilihat dari konteks kepentingan nasional apa yang perlu dilindungi dari negara tersebut.

Penggunaan teori pertahanan negara dalam penelitian ini memiliki manfaat untuk memahami tindakan-tindakan Indonesia dalam merespon

ancaman dari Cina. Tindakan-tindakan yang berbentuk kebijakan tersebut dimaknai sebagai usaha Indonesia untuk mempertahankan negaranya, dan tentu kepentingan nasionalnya.

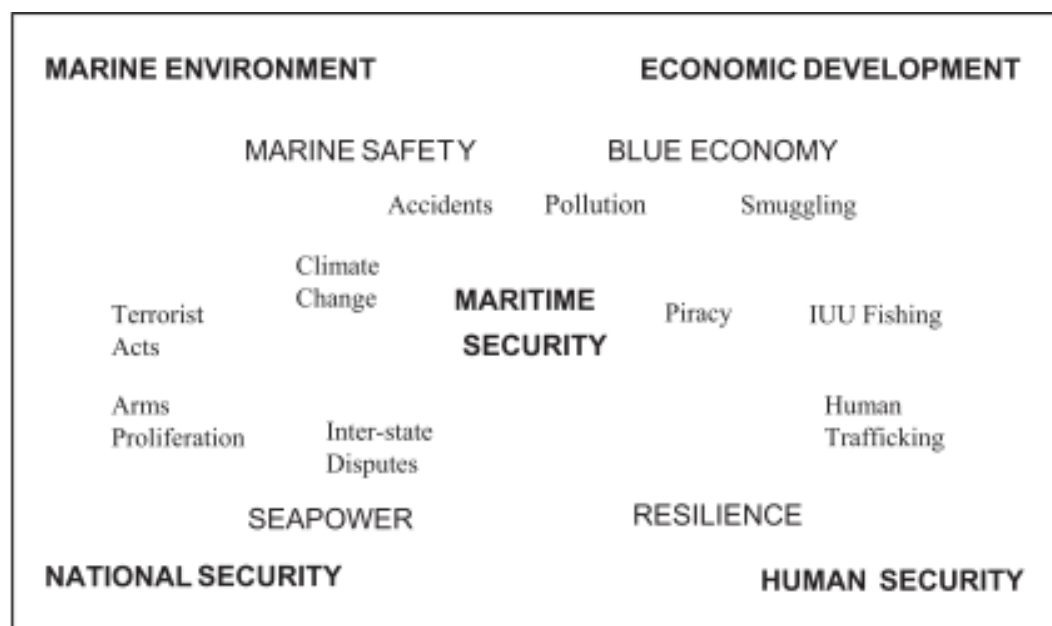
2.1.2. Teori Keamanan Maritim

Bisa dikatakan bahwa konsep keamanan maritim merupakan konsep yang baru dalam studi Keamanan Internasional (*International Security*). Pertama kali muncul di tahun 1990-an, konsep ini kemudian mampu menyita atensi besar dunia akademisi maupun praktisi, karena meningkatnya perhatian terhadap maraknya terorisme di laut yang merebak pada tahun 2000 an. Tidak hanya itu, masih ada soal kejahatan maritim lainnya seperti penyelundupan manusia yang bisa berujung perbudakan bahkan pembunuhan, perompakan di Somalia maupun Selat Malaka, dan kemudian munculnya istilah *blue economy* yang mendapatkan respon besar masyarakat, serta isu-isu perlindungan lingkungan (*environment*) laut dan manajemen sumber daya alam yang tersedia di dalamnya.

Ketertarikan dalam dunia keamanan maritim –hal yang membuat disiplin ilmu ini lebih dipelajari— semakin membesar terlebih lagi apabila dikaitkan dengan isu-isu persengketaan wilayah laut yang panas, misal konflik di Laut China Selatan yang melibatkan Tiongkok. Konflik ini tentu membuat negara-negara di dunia, terkhususnya negara di Kawasan ASEAN, mengutamakan kewaspadaan pada wilayah lautnya, karena sedang berhadapan dengan kekuatan besar dan dominan. Maka benar pula bila laut selalu mengandung unsur-unsur geopolitik yang mengharuskan sebuah negara menaruh perhatian lebih di dalamnya. Ini tidak hanya soal kedaulatan negara dari ancaman-ancaman luar yang membahayakan, tetapi lebih dari itu, yaitu tentang pemanfaatan laut sebagai penguat ekonomi nasional dalam dunia yang semakin terkoneksi dan membutuhkan strategi yang tepat dan relevan. Sejalan dengan itu, bisa dilihat bahwa prioritas mengenai keamanan maritim menjadi hal yang diperhatikan dalam konteks kerjasama strategis multilateral ataupun usaha

internal nasional. Hal inilah yang ditunjukkan oleh negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, India, dan juga organisasi internasional seperti NATO, Uni Eropa, hingga Uni Afrika (Bueger & Edmunds, 2017).

Atas faktor-faktor di ataslah, yang kemudian membuat Bueger (2015) merumuskan konsep keamanan maritim yang komprehensif. Ia mengaitkan kata keamanan maritim dengan kekuatan laut (*seapower*), keamanan pelayaran (*marine safety*), *blue economy*, dan ketahanan manusia (*human resilience*). Ini bukanlah tanpa alasan, Bueger menginginkan istilah 'keamanan maritim' menjadi sebuah konsep yang menjembatani konsep-konsep lama seperti *seapower* dan *marine safety* dengan konsep-konsep aktual dan relevan seperti *blue economy* dan *human resilience*, menjadi sebuah matrix yang saling berkaitan. Berikut adalah ilustrasi konsep matrix keamanan maritim.



Gambar 2.1 Maritime Security Matrix

Sumber: (Bueger, 2015)

Matriks di atas adalah alat analisis untuk memahami perbedaan dan kesamaan pemahaman dari aktor yang berbeda dalam memandang apa itu

keamanan maritim. Dengan matriks tersebut, pertama-tama memungkinkan untuk mempelajari jenis-jenis hubungan yang dibentuk oleh aktor aktor yang berbeda antara keamanan maritim dan konsep-konsep lain. Matriks ini juga memberikan pandangan untuk meneliti apa yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam konsep keamanan maritim. Terlihat interpretasi ancaman dapat sangat berbeda. Untuk beberapa aktor, ancaman atau permasalahan mungkin terkait dengan dimensi ekonomi, sementara untuk yang lain terkait dengan masalah keamanan atau kedaulatan nasional.

Utilisasi teori keamanan negara di dalam penelitian ini bermanfaat dalam memahami usaha-usaha Indonesia dalam merespon ancaman Cina sebagai ikhtiar Indonesia dalam mencapai keamanan maritimnya. Apalagi, perlu digarisbawahi, bahwasanya salah satu elemen keamanan maritim sendiri adalah *national security* yang mengandung unsur "*inter-state dispute*". Lebih jauh dari itu, pelanggaran Cina di ZEE Indonesia yang dilakukan oleh nelayan-nelayannya merupakan tindakan IUU Fishing. Dengan kata lain, tindakan tersebut telah mengancam dimensi "*economic development*" dalam matriks Bueger (2015)

2.1.3. Teori Kawasan

Lingkungan strategis adalah lingkungan eksternal yang mempengaruhi kebijakan keamanan nasional. Ini dapat dilihat sebagai area di mana kepentingan nasional diterapkan dan di mana kepentingan nasional dapat berhadapan bahkan berbenturan dengan kepentingan aktor lain dalam sistem hubungan internasional. Lingkungan strategis adalah tempat di mana proses interaksi antar kepentingan nasional tersebut berlangsung secara substansial dan memungkinkan untuk mempengaruhi tingkat keamanan nasional. Dibandingkan dengan lingkungan di dalam negeri di mana kedaulatan negara dapat beroperasi penuh, lingkungan

strategis penuh dengan ketidakpastian dan kemungkinan untuk dapat mengendalikannya sangat terbatas (Frank, 2020).

Untuk memahami lingkungan strategis yang melingkupi sebuah negara, Frank (2020) dalam tulisannya yang berjudul *The Czech Republic Security Environment* membagi tiga level pada konteks geografisnya. Masing-masing level ini memiliki dimensi teritorial dan dinamis yang mampu memberikan pengaruh pada lingkungan strategis suatu negara. Adapun itu adalah: pertama, *immediate security environment*, yang mencakup negara-negara yang bertetangga dan memiliki batas-batas teritorial langsung. Batas-batas teritorial ini memberikan dampak situasi krisis. Kedua, *close security environment*, yang meliputi kawasan regional yang lebih luas. Ketiga, *wide security environment*, yang mencakup negara-negara kuat (*major power*) regional dan global.

Dengan mengangkat kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon ancaman Cina di Laut Cina Selatan, penelitian ini memahami bahwasanya konflik ini tidak lain adalah konflik yang terjadi di dalam sebuah region bersama. Adapun region yang menjadi panggung konflik ini sendiri adalah Asia Pasifik yang saat ini mulai berubah menjadi Indo-Pasifik.

2.1.4. Teori Hubungan Internasional

Penelitian ini akan menggunakan teori Realisme Neoklasik yang muncul dalam khazanah studi Hubungan Internasional pada tahun 1990-an. Dalam rentang sejarahnya, nama “Realisme Neoklasik” dituturkan pertama kali oleh Gideon Rose dalam artikelnya yang berjudul *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy* pada tahun 1998. Realisme Neoklasik ala Gideon Rose menginkorporasikan variabel eksternal dan variabel internal dalam kerangka analisisnya, namun perlu digarisbawahi bahwa teori ini menjadikan kekuatan sistem internasional (variabel eksternal) sebagai kekuatan utama dalam pengaruhnya ke dalam perumusan kebijakan luar negeri, terutama kekuatan materiil (Rose, 1998).

Realisme Neoklasik meminjam pemahaman dari Neorealisme yang percaya bahwa dunia internasional bersifat anarki dan berbahaya bagi suatu negara. Dengan itu, menurut Realisme Neoklasik, tujuan utama negara adalah survival atau mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dengan keadaan sistem internasional yang anarki tersebut, masing-masing negara tidak dapat memastikan intensi negara lainnya dalam ketiadaan otoritas yang melampaui negara dalam lingkungan internasional. Oleh karenanya, negara akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam upaya untuk melindungi dirinya masing-masing dari segala bentuk ancaman. Dengan pengaruhnya pada kebijakan luar negeri, sistem internasional yang anarkis ini selanjutnya menjadi subfokus independen dalam analisis Realisme Neoklasik.

Walaupun begitu, sistem internasional yang anarkis ini belum tentu akan menyetir kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini dikarenakan struktur internasional tersebut masih ditransmisikan terlebih dahulu ke dalam politik domestik yang kompleks. Bahkan, alih-alih struktur internasional membentuk secara pasti kebijakan luar negeri, politik domestik justru lebih dominan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dalam penelitian He (2008) misalnya, ketika ia menganalisis politik luar negeri Indonesia pasca reformasi, ia menemukan fakta bahwa politik domestik ketika Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri begitu kuat dan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia sehingga melakukan *balancing*. Dengan mengikuti kreativitas He (2008), penelitian ini akan mengangkat subfokus politik birokrasi.

Dalam pengembangannya lebih lanjut, Schweller (2004) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara memungkinkan untuk menjadi *underbalancing* dan *non-balancing*. Schweller (2004) mendefinisikan *underbalancing* adalah fenomena ketika *“threatened countries have failed to recognize a clear and present danger or, more typically, have simply not reacted to it or, more typically still, have responded in paltry and imprudent ways”*. *Underbalancing* ini memungkinkan untuk

terjadi karena adanya fragmentasi politik yang kuat di antara elite politik yang bertanggungjawab pada perumusan kebijakan-kebijakan keamanan. Berbeda dengan *underbalancing*, *non-balancing* terjadi ketika tidak ada kesepakatan antar birokrat terkait definisi ancaman dan respon apa yang perlu diambil atas ancaman tersebut. Walaupun tetap ada friksi di antara masing-masing birokrat, *Non-balancing* memungkinkan negara memberikan respon yang masih *prudent* atas ancaman yang diterimanya (Sari, 2021).

Aplikasi teori hubungan internasional terutama Realisme Neoklasik dalam penelitian ini, berguna untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dari administrasi Yudhoyono dan administrasi Joko Widodo dengan dua variabel. Realisme Neoklasik sendiri mengangkat dua variabel analisis penting di dalam dirinya, yaitu variabel eksternal dan variabel internal suatu negara. Variabel eksternal di sini adalah sebuah sistem internasional konfliktual yang terwakili sikap asertivitas Cina, sedangkan variabel internal di dalam penelitian ini terwakili oleh analisis politik birokrasi.

2.1.5. Teori Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi diterapkan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya. Menurut G.R. Berridge (2010), konsep diplomasi merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Seiring dengan maraknya isu keamanan maritim dalam konteks keamanan internasional, saat ini terdapat konsep diplomasi

baru yang tidak hanya berkutat pada lima konsep di atas yaitu diplomasi maritim (Nugraha & Sudirman, 2016). Berikut adalah beberapa jenis diplomasi:

- Diplomasi Publik merujuk pada kegiatan diplomasi yang ditujukan pada masyarakat maupun institusi dari negara yang dituju. Tipe diplomasi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat domestik negara tujuan dengan berbagai cara, misalnya saja pertukaran ide, budaya, perdagangan, hingga sumber daya manusia. Diplomasi public sangat membantu diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara dengan cara memengaruhi masyarakat negara tujuan.
- Diplomasi Ekonomi digunakan sebagai instrumen dalam mendukung kepentingan ekonomi suatu negara. Artinya, diplomasi ekonomi diaplikasikan dengan maksud menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.
- Diplomasi Budaya ditujukan untuk menciptakan hubungan dengan negara-negara lain, baik secara bilateral ataupun multilateral, dengan menggunakan instrumen budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, media, pariwisata, dan lain-lain. Diplomasi budaya berfungsi hampir sama dengan diplomasi publik, karena ingin menciptakan citra dari suatu negara ke negara lainnya.
- Diplomasi Parleментар biasanya dilakukan oleh negara-negara yang bersistem republic sehingga ada fungsi legislatif di negara tersebut. Diplomasi ini bertujuan untuk bertukar pengalaman dan ide terkait kerja parlementer
- Diplomasi Pertahanan biasanya berkutat pada kerjasama pertahanan antar negara yang bertujuan dalam realisasi dan melindungi kepentingan nasional serta pencegahan konflik.
- Diplomasi Maritim adalah istilah yang digunakan untuk berbagai jenis operasi di wilayah laut atau perairan, yaitu gugus tugas utama di bawah Angkatan Laut suatu negara berdaulat. Di masa damai,

diplomasi maritim dipraktikkan untuk mempengaruhi perilaku negara lain dalam konteks interaksi dan transaksi yang terjadi di perairan teritorial. Diplomasi maritim juga dikatakan setara dengan diplomasi Angkatan Laut.

Penggunaan teori diplomasi di dalam penelitian ini berguna untuk memahami bahwa Indonesia menggunakan diplomasi dalam merespon tindakan Cina di Laut Cina Selatan. Dalam proses itu, Indonesia tetap mengedepankan kepentingan nasionalnya dan bertarung dalam duel diplomasi, baik dalam forum bilateral ataupun multilateral.

2.1.6. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki banyak sekali definisinya. Untuk memasuki itu, hal yang perlu difinisikan pertama kali adalah definisi kebijakan itu sendiri. Carl J Federick menjelaskan kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2008).

Definisi kebijakan berbeda dengan definisi kebijakan publik (*public policy*). Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik ini. Chandler dan Plano menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah (Tangkilisan, 2003). Dari definisi itu, dapat dilihat bahwa kebijakan publik ada karena dilandasi oleh kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Permasalahan di masyarakat menjadi impuls bagi perumusan kebijakan publik.

Secara general, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan

kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Dalam membuat kebijakan publik, paling tidak, menurut Widodo (2007) terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui yaitu : 1) problem identification, 2) agenda setting, 3) policy problem formulation, dan 4) policy design.

- Problem Identification

Dalam proses mengidentifikasi dan memahami masalah, kita harus mampu memetakan situasi masalah dengan mengamati atau menganalisis semua perubahan yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

- Agenda Setting

Agenda setting merujuk pada suatu peristiwa yang dinilai oleh masyarakat perlu diambil suatu tindakan untuk meresponnya. Artinya agenda setting bisa dimaknai sebagai suatu kesepakatan umum tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama dan menurut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya.

- Policy Problem Formulation

Pada tahap ini, masalah yang sudah teridentifikasi dan mendapatkan dukungan besar dari publik karena agenda setting, akan dijabarkan kembali dalam kondisi yang lebih sistematis.

- Policy Design

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan

publik apa yang perlu diambil. Untuk menemukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil, maka perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut. *Policy design* adalah tahap di mana para pengambil kebijakan publik mengambil pilihan terbaik dari berbagai opsi kebijakan yang ada.

Penggunaan teori kebijakan publik di dalam penelitian ini dikarenakan respon Indonesia terhadap tindakan Cina di Laut Cina Selatan dapat dipahami sebagai suatu bentuk kebijakan publik, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Terutama dalam kebijakan-kebijakannya di Natuna, ini adalah serangkaian kebijakan publik dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

2.1.7. Teori Perbandingan Kebijakan Luar Negeri

Perbandingan kebijakan luar negeri adalah subbidang studi dalam kajian Hubungan Internasional. Ini nantinya akan melihat bagaimana kebijakan luar negeri memungkinkan untuk diambil (*decision making process*) oleh suatu negara, baik dalam momentum-momentum tertentu, atau dalam bingkai pola interaksi suatu negara dengan negara lainnya (Lantis & Beasley, 2017).

Perkembangan studi perbandingan kebijakan luar negeri banyak diinisiasi oleh para akademisi ilmu politik seperti Richard Snyder dan James Rosenau pada tahun 1950-an dan 1960-an. Langkah yang paling penting dalam usaha perbandingan politik luar negeri adalah dengan melihat perbedaan-perbedaan dari dua atau lebih kebijakan luar negeri yang dirasa berbeda. Dari situ, peneliti akan bisa memulai analisisnya terkait fenomena yang akan diteliti (Rosenau, 1968).

Seperti yang dijelaskan oleh Lantis & Beasley (2017) penelitian perbandingan kebijakan luar negeri akan berfokus pada proses perumusan kebijakan luar negeri itu sendiri. Dengan menilik kebijakan luar negeri yang terproduksi secara spesifik dalam konteks waktu dan situasi, perbandingan

kebijakan luar negeri akan mampu mengetahui keunikan-keunikan tersendiri di dalam perumusan kebijakan tersebut. Perbandingan kebijakan luar negeri bisa dianalisis dari beberapa level, yaitu dari level individual (idiosinkretik), level masyarakat, level peran, level pemerintahan, dan level sistem internasional (*systemic factor*) (Rosenau, 1968). Utilisasi teori perbandingan kebijakan luar negeri memiliki signifikansi dalam membandingkan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan di bawah administrasi Yudhoyono dan administrasi Joko Widodo.

2.1.8. Teori Strategi *Hedging*

Menurut Ciorciari & Haacke (2019) *hedging* adalah “*national security or alignment strategy, undertaken by one state toward another, featuring a mix of cooperative and confrontational elements*”. *Hedging* adalah keputusan untuk memperlebar jaringan-jaringan diplomatik dengan negara lain yang berkaitan dengan pertahanan sebuah negara. Sebuah negara memungkinkan menjalin dengan negara yang mengancamnya, namun di sisi yang lain juga melakukan hubungan dengan musuh negara pengancam tersebut. Tidak hanya itu, strategi *hedging* juga menekankan adanya tarik ulur dalam hubungan antar negara: sebuah negara memungkinkan untuk melakukan tindakan kooperatif sekaligus konfrontatif terhadap negara pengancam.

Strategi *hedging* sendiri adalah sebuah teori baru dalam khazanah Hubungan Internasional. Teori ini menjawab beberapa defisiensi dalam menjawab beberapa permasalahan Hubungan Internasional sebagai sebuah kajian dan praktis. Ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana negara menanggapi meningkatnya kekuatan yang memungkinkan untuk menantang kepentingan keamanan mereka? Ketika mereka menjalin ikatan erat dengan kekuatan besar yang bersahabat, bagaimana mereka menjaga dari kemungkinan pengabaian atau ditinggalkan begitu saja? bagaimana para pembuat keputusan kebijakan luar negeri berupaya mengatasi

tantangan keamanan di lingkungan internasional yang sangat tidak pasti? Dalam teori-teori Hubungan Internasional sebelumnya, saran yang muncul hanya melakukan keberpihakan penuh pada satu blok kekuatan sembari menegasikan blok yang lain (semisal, *balancing* dan *bandwagoning*). Praktik-praktik ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Perang Dingin yang membuat dikotomi dalam politik global.

Strategi *hedging* muncul untuk mengisi kekurangan di atas. Alih-alih mengambil sisi yang jelas untuk melawan atau memihak satu kekuatan besar yang sedang berkembang, strategi *hedging* menyarankan negara berupaya untuk mengurangi risiko dalam kondisi strategis yang tidak pasti. Dikarenakan *hedging* menekankan agar negara tidak melakukan alignment secara kuat pada poros kekuatan tertentu, *hedging* adalah strategi yang paling minim risiko bagi negara-negara yang tidak dominan dalam menghadapi ketidakpastian politik internasional. Strategi *hedging* berusaha untuk mengelola potensi ancaman-ancaman yang memungkinkan ada dengan cara membuat hubungan dengan banyak pihak termasuk terhadap sumber ancaman itu sendiri (Ciorciari & Haacke, 2019).

2.2. Penelitian Terdahulu

Subbab ini akan menjabarkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tulisan ini. Penelaahan literatur terdahulu memungkinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber data yang nantinya akan memperkaya penelitian ini sembari mencari *gap* penelitian.

2.2.1. Syailendra (2017)

Judul: *A Nonbalancing Act: Explaining Indonesia's Failure to Balance Against the Chinese Threat*

Proyek Poros Maritim Dunia dianggap menjadi tonggak kebijakan luar negeri Indonesia yang ofensif. Namun, anggapan ini nyatanya keliru mengingat Indonesia, walaupun memiliki ancaman kemaritiman yang nyata

datang dari Cina, namun tidak melakukan *balancing*. Alih-alih meresponnya dengan keras sebagaimana prediksi analis, Indonesia justru dinilai diam dan tidak melakukan apa-apa walaupun ancaman dari Cina sudah di depan mata. Dalam hal inilah Syailendra berargumen bahwa telah terjadi politik birokrasi di tubuh pemerintah Indonesia dan keinginan besar Jokowi atas investasi dari Cina yang membuat Indonesia tidak melakukan respon asertif. Argumen Syailendra ini sesuai dengan menggunakan teori milik Randal Schweller yang mengatakan bahwa negara tidak akan melakukan kebijakan *balancing* bila ada perpecahan dalam aktor-aktor pembuat kebijakan dalam negeri.

2.2.2. Lim, G, Li, C, Syailendra, E.A (2021)

Judul: *Why is it so hard to push Chinese railway projects in Southeast Asia? The role of domestic politics in Malaysia and Indonesia.*

Investasi infrastruktur Cina sangat besar menyasar Indonesia dan Malaysia. Hal ini menyusul dari meningkatnya kebutuhan dua negara itu dalam memaksimalkan infrastruktur dalam negeri guna meningkatkan performa ekonomi. Walaupun begitu, proses investasi ini dinilai kontroversial sehingga beberapa pihak melakukan penolakan atas proyek besar tersebut. Dengan menganalisis struktur politik dalam negeri kedua negara, penelitian ini menemukan fakta bahwa Malaysia memiliki struktur politik yang lebih terdesentralisasi dibandingkan dengan Indonesia. Lebih jauh, perbedaan ini nyatanya memiliki implikasi yang sistemik terhadap penerimaan infrastruktur Cina. Dengan keputusan penerimaan investasi dari Cina dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah di kedua negara melakukan resistensi. Namun resistensi ini mudah diselesaikan oleh struktur politik yang lebih tersentralisasi seperti Indonesia. Sebaliknya, Malaysia sendiri memiliki struktur politik yang lebih terdesentralisasi sehingga penyelesaian isu investasi infrastruktur ini lebih rumit daripada Indonesia.

2.2.3. Laksmana (2016)

Judul: *The Domestic Politics of Indonesia's Approach to the Tribunal Ruling and the South China Sea.*

Pada tanggal 12 Juli 2016, Arbitrase Internasional menyatakan bahwa tindakan Cina yang memperluas wilayah lautnya di Laut Cina Selatan dinyatakan ilegal. Pembawaan isu sengketa Laut Cina Selatan ke Arbitrase Internasional ini sendiri dilakukan oleh Filipina setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan dengan Cina terkait klaim wilayah. Selepas itu, Indonesia mengeluarkan lima pernyataan yang dinilai ambigu dan tidak bersemangat. Pernyataan yang merepresentasikan sikap Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan ini kemudian dianalisis secara lebih lanjut oleh Evan Laksmana. Bagi Laksmana, sikap ini adalah hasil dari posisi ketidakjelasan Indonesia di dalam konflik ini yang akhirnya menimbulkan keanehan. Lebih dari itu, sikap ini juga merupakan implikasi dari ketidaktertarikan Presiden Joko Widodo terkait isu-isu politik luar negeri. Sikap personal Presiden Joko Widodo ini akhirnya, sayangnya, membuat peran politik birokrasi dalam negeri menjadi lebih dominan dalam merespon isu Laut Cina Selatan daripada pertimbangan geopolitik.

2.2.4. Laksmana (2018)

Judul: *Drifting towards Dynamic Equilibrium: Indonesia's South China Sea Policy under Yudhoyono.*

Pada tulisan ini, Evan Laksmana menjelaskan bagaimana kebijakan Indonesia atas Laut Cina Selatan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 2004-2014, kebijakan Indonesia berdasar pada tiga konsep yang saling berkorelasi: *non-claimant*, *honest-broker*, dan *confidence builder*. Konsep pertama ini datang dari klaim Indonesia bahwa ia bukanlah pihak yang ikut bersengketa di Laut Cina Selatan. Konsep p

ertama tersebut melahirkan konsep kedua dan ketiga. Di saat Indonesia mengaku bahwa ia bukanlah pihak bersengketa, Indonesia kemudian berupaya menjadi pen jembatan komunikasi antar negara-negara berkonflik (*honest broker*), sembari berusaha menciptakan rasa percaya antar mereka (*confidence builder*).

Tiga konsep di atas, walaupun dilakukan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun bukanlah kebijakan yang murni dihasilkan oleh administrasi ini. Tiga konsep di atas berakar dari sejarah panjang pendekatan Indonesia terhadap Laut Cina Selatan, terutama sejak 1990-an. Lebih jauh lagi, Evan Laksmana berargumen bahwa setidaknya ada empat dimensi yang mempengaruhi pendekatan Indonesia terhadap Laut Cina Selatan itu: (1) kedaulatan dan sumberdaya alam (2) militer dan keamanan (3) hubungan bilateral Indonesia-Cina (4) sentralitas dan kohesivitas ASEAN.

2.2.5. Darmawan (2018)

Judul: *Perubahan Perilaku Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Isu Laut Tiongkok Selatan*

Dalam merespon Laut Cina Selatan, Darmawan (2018) membagi empat fase perilaku politik luar negeri Cina. Perubahan perilaku politik luar negeri Cina ini sangat berdasar pada kekuatan militer dan ekonominya yang terus meningkat, dan ini dijadikan sebagai motivasi dan kekuatan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Fase pertama perilaku politik luar negeri Cina pada tahun 1990-1995 dikategorikan sebagai pasif dan defensif. Fase kedua perilaku politik luar negeri Cina pada tahun 1996-1999 dikategorikan sebagai aktif. Fase ketiga dari perilaku politik luar negeri Cina pada tahun 2000-2011 disebut sebagai inisiatif, dan fase keempat dari tahun 2011 hingga sekarang dinilai asertif

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Publikasi	Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi & Perbedaan
1	<i>A Non Balancing Act: Explaining Indonesia's Failure to Balance the Chinese Threat</i>	Syailendra, Emirza Adi (2017)	Kualitatif	Perpecahan politik domestik menyebabkan Indonesia tidak mampu melakukan <i>balancing</i> terhadap ancaman nyata Cina	<p>Relevansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menganalisis politik domestik Indonesia dalam merespon ancaman Cina 2) Memetakan aktor-aktor politik dalam negeri yang saling berkonflik. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian ini tidak melihat secara adil respon-respon asertif Indonesia dan justru dinilai tidak signifikan 2) Penelitian ini tidak melihat keberjalanan sikap Indonesia yang sebenarnya dinamis dalam merespon isu Laut Cina Selatan
2	<i>Why is it So Hard to Push Chinese Railways Projects in Southeast Asia? The Role of</i>	G Lim, C Li, EA Syailendra (2021)	Kualitatif	Penelitian ini berhasil memotret struktur politik dalam negeri Indonesia dan Malaysia dan kaitannya dengan politik penerimaan investasi infrastruktur Cina.	<p>Relevansi:</p> <p>Penelitian ini mampu memberikan gambaran kondisi struktur politik dalam negeri. Ini nantinya akan sangat berguna dalam analisis perumusan</p>

No	Judul Publikasi	Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi & Perbedaan
	<i>Domestic Politics in Malaysia and Indonesia</i>				kebijakan dengan teori Realisme Neoklasik Perbedaan: Penelitian ini tidak menganalisis bagaimana struktur politik dalam negeri Indonesia dan Malaysia dalam kaitannya dengan perilakunya merespon isu Laut Cina Selatan
3	<i>The Domestic Politics of Indonesia's Approach to the Tribunal Ruling and the South China Sea</i>	Laksmana, Evan A. (2016)	Kualitatif	Indonesia memiliki sikap yang tidak bersemangat dalam merespon hasil Arbitrase Internasional yang membahas sengketa Laut Cina Selatan. Sikap ini bisa dihasilkan posisi Indonesia yang tidak jelas dalam Laut Cina Selatan. Selain itu, sikap personal Presiden Joko Widodo yang antipati terhadap politik luar negeri juga memiliki peran yang besar atas sikap Indonesia ini. Ketidaktertarikan Presiden Joko Widodo dengan isu internasional melahirkan politik domestik yang	Relevansi: 1) Penelitian ini memberikan informasi bagaimana sikap ketidakpedulian Presiden Joko Widodo dengan isu luar negeri dan implikasi dari sikap itu 2) Penelitian ini menyajikan dinamika politik dalam negeri saat merespon isu Laut Cina Selatan. Perbedaan: Penelitian ini tidak menganalisis dinamika tekanan struktur internasional yang berpengaruh pada pecahnya

No	Judul Publikasi	Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi & Perbedaan
				saling berkonflik dan saling berusaha memberikan pengaruh pada perilaku Indonesia di Laut Cina Selatan.	kongsi politik domestik di Indonesia dalam merespon isu Laut Cina Selatan.
4	<i>Drifting towards Dynamic Equilibrium: Indonesia's South China Sea Policy under Yudhoyono</i>	Laksmana, Evan A. (2018)	Kualitatif	Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan Indonesia di Laut Cina Selatan di bawah administrasi Susilo Bambang Yudhoyono. Di bawah administrasi Yudhoyono, Indonesia memiliki tiga konsep dalam kebijakannya: <i>Non-Claimant</i> , <i>Honest Broker</i> , dan <i>Confidence Builder</i> . Lebih jauh lagi, Evan Laksmana berargumen bahwa setidaknya ada empat dimensi yang mempengaruhi pendekatan Indonesia terhadap Laut Cina Selatan itu: (1) kedaulatan dan sumberdaya alam (2) militer dan keamanan (3) hubungan bilateral Indonesia-Cina (4) sentralitas dan kohesivitas ASEAN.	<p>Relevansi:</p> <p>1) Penelitian ini memberikan rentang kesejarahan kebijakan Indonesia terhadap Laut Cina Selatan, terutama saat di bawah administrasi Yudhoyono.</p> <p>2) Penelitian ini menyajikan fakta bahwa Indonesia di bawah Yudhoyono memiliki sedikit perpecahan politik domestik.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini belum menggambarkan dinamika kebijakan Indonesia terhadap Laut Cina Selatan kontemporer.</p>

No	Judul Publikasi	Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi & Perbedaan
5	<i>Perubahan Perilaku Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Isu Laut Tiongkok Selatan</i>	Darmawan, Arief Bakhtiar (2018)	Kualitatif	Penelitian ini membahas bagaimana perubahan perilaku politik luar negeri Cina pada konflik Laut Cina Selatan. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa Cina mengalami empat fase perubahan perilaku politik luar negerinya terhadap konflik ini; pertama pasif defensif; kedua aktif; ketiga inisiatif; keempat adalah asertif.	<p><u>Relevansi:</u> Penelitian ini berhasil membahas perubahan perilaku politik luar negeri Cina terhadap konflik Laut Cina Selatan. Ini juga menggambarkan asertivitas Cina di Laut Cina Selatan yang memungkinkan memberikan efek kepada negara-negara yang tergabung dalam konflik tersebut, tanpa terkecuali Indonesia yang pada akhirnya mendapatkan gangguan di Laut Natuna Utara.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Penelitian ini tidak membahas kaitan perubahan perilaku politik luar negeri Cina yang menjadi asertif sejak tahun 2011 dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan.</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian terdahulu dengan tema maupun permasalahan yang sejenis dengan penelitian yang sedang dilakukan kelompok peneliti saat ini, dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, sebagai referensi dan sebagai informasi untuk melihat perbedaan penelitian yang saat ini sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Judul:

Asertivitas Cina dan Politik Birokrasi di dalam Kebijakan Luar Negeri
Indonesia terhadap Isu Laut Cina Selatan



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti